

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumberdaya alam terutama lahan sangat erat kaitannya dengan manusia, dimana antara keduanya sama-sama saling melengkapi satu sama lain, baik alam yang menyediakan kekayaan serta kebermanfaatannya bagi manusia, begitupun manusia yang menjadikan alam ini beserta isinya sebagai tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, lahan terutama tanah adalah bagian terpenting dari sumberdaya alam yang senantiasa dapat diperbaharui oleh manusia, terkadang dalam penggunaannya sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut kepemilikan lahan dan penggunaan lahan. Lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan hidup. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Seiring dengan berjalannya waktu adanya pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik, justru dampak tersebut dialami oleh negara seperti Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumberdaya alam dimana struktur pembangunan ekonomi negara ditunjang oleh sektor pertanian. Namun, dari tahun ke tahun luasan lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut. Luas lahan pertanian di Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun (2008-2012) terus mengalami penurunan. Penyebabnya adalah alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan besaran minimal terjadi pengurangan 100.000 ha per tahun Selain itu, masih banyak lahan kosong yang belum diusahakan untuk pertanian yaitu sebesar 750.976 Ha (BPS,2013).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak menampung tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia sebanyak 31.705.337 orang. Pendapatan perkapita petani tahun 2014 dengan sampel 418.000 rumah tangga, diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian sebesar Rp 2,2 juta per bulan atau Rp 550.000 per kapita per bulan

(asumsi rata-rata jumlah anggota rumah tangga empat orang). Rata-rata pendapatan tersebut dua kali lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan pedesaan sebesar Rp 286.000 (BPS, kondisi Maret 2014).

Seiring bertambahnya populasi penduduk, penggunaan lahan untuk pertanian mulai terusik. Dampak penambahan penduduk yang berpengaruh terhadap pertanian adalah adanya penyusutan lahan pertanian yang disebabkan kegiatan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Tercatat bahwa laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian sebesar  $\pm$  110.000 ha/tahun (BPS, 2002). Selain berdampak pada produktivitas pertanian, alih fungsi lahan juga berpengaruh pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat petani di wilayah tersebut.

Alih fungsi lahan berdasarkan UU NO. 26 TAHUN 2007 pasal 33 ayat 1 merupakan pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Adanya alih fungsi lahan pada umumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi, faktor internal melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan, serta faktor kebijakan karena adanya aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Hal ini menyebabkan produksi padi turun, pertumbuhan produksi padi sawah yang melambat, meningkatkan ketergantungan pada pangan impor serta hilangnya investasi dalam pembangunan prasarana irigasi teknis. Seperti di kecamatan Kertajati seluas 1800 hektar untuk pembangunan Bandara Internasional sekitar 1200 hektar masih bisa digunakan untuk aktifitas pertanian (Sinarmedia). Pada tahun 2013 lahan pertanian yang dimiliki Kab.Majalengka mencapai 51.946 hektar setelah adanya pembangunan perumahan, pabrik, jalan tol dan bandara yang semuanya dibangun di atas lahan produktif, kini lahan pertanian berkurang menjadi 50.280 hektar saja (Sensus Pertanian).

Kegiatan alih fungsi lahan sudah mendapatkan kecaman dari pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No P.50/Menhut-II/2009 tentang

Penugasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, memungkinkan adanya pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Meskipun telah ada peraturan yang melarang untuk alih fungsi lahan kembali, kegiatan ini masih tetap berjalan sehingga area luasan lahan produktif pertanian semakin menurun. Dampak langsung diterima oleh petani pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat yang berujung pada kesejahteraan.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Parameter kesejahteraan menurut UU No 6 tahun 1974 adanya rasa nyaman, keselamatan, dan ketentraman baik dari kehidupan social material maupun spiritual. Melihat kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia kini semakin menurun, mayoritas penduduk Indonesia 32 juta (15%) berasal dari kalangan menengah, 50 Juta (40%) berada pada kalangan yang terdiri dari petani dan pekerja. Sekitar 45% penduduk Indonesia berada pada hidup berada di bawah garis kemiskinan (Investor edisi 93, Januari 2004).

Berdasarkan hasil sensus pertanian (BPS,2013), menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian saat ini sebanyak 26,13 juta rumah tangga atau menurun sebanyak 5,04 juta rumah tangga bila dibandingkan dengan hasil sensus pertanian pada tahun 2003. Seperti yang terjadi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2000-2002, luas konversi lahan sawah yang ditujukan untuk pembangunan nonpertanian, seperti kawasan perumahan, industri, perkantoran, jalan, dan sarana publik lainnya rata-rata sebesar 110.160 hektar per tahun. Ini berarti, terdapat sekitar 3000 hektar sawah per hari yang beralih fungsi ke nonpertanian. Di daerah Jawa Barat, laju konversi sawah irigasi rata-rata 5.000-7.000 hektare per tahun. Salah satu daerah di Jawa Barat yang cukup memprihatinkan dalam hal konversi lahan adalah di daerah Majalengka. Dimana jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Majalengka mengalami

penurunan sebanyak 47.893 rumah tangga dari 204.519 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 156.626 rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 2,34 persen per tahun. Di semua kecamatan terjadi penurunan, penurunan terbesar terjadi di Kecamatan Kadipaten sebesar 48.86% dan penurunan terkecil terjadi di Kecamatan Sindang yaitu sebesar 4.69% (Sensus pertanian, 2013). Tentunya, imbas dari pengurangan rumah tangga petani berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Barat, yang memasok sekitar 586.591 ton padi termasuk ke dalam 10 penyumbang padi terbanyak di provinsi (BPS, 2012). Khusus untuk tanaman pangan seperti jagung dan kacang Majalengka menempati peringkat 2 dan 3 sebagai pemasok tanaman pangan di Jawa Barat. Kondisi dan kesesuaian alam yang mendukung pertumbuhan tanaman pangan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Hal ini, merupakan nilai plus bagi Kabupaten Majalengka yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dengan kekayaan alam dan kesesuaian alam untuk tumbuh kembangnya tanaman pangan maupun hortikultura yang ada di Kabupaten Majalengka mendorong daerah tersebut menjadi sentral bibit nasional yang cakupannya tidak hanya mensuplai kebutuhan bibit tanaman hortikultura yang ada di Indonesia akan tetapi, kegiatan ekspor luar negeri pun menjadi sasaran utama. Namun, seiring dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka, mengakibatkan terjadinya penyusutan areal lahan pertanian yang cukup besar. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terintegrasi dengan jalan tol serta prasarana lain. Upaya pembangunan tersebut menghabiskan lahan seluas 2866 ha.

Dengan adanya pembangunan tersebut bukan tidak mungkin memicu pembangunan-pembangunan lainnya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang akan datang ke Kabupaten Majalengka. Tentunya, pelayanan itu bukanlah berupa sajian dengan bentangan alam yang hijau akan kayanya alam Majalengka dengan tingkat produktivitas hasil tanaman pangan dan hortikultura sebagai salah satu kebanggaan Kabupaten Majalengka tetapi justru hal-hal lain yang sifatnya penunjang untuk keberlangsungan tumbuh kembangnya Bandara

Internasional Jawa Barat (BIJB) yang ada di daerah tersebut. Perhotelan, rumah makan, sarana rekreasi, serta pusat perbelanjaan nantinya akan semakin menjamur di Kabupaten Majalengka. Pastilah akan mengakibatkan semakin menyusutnya lahan pertanian yang beralih ke non pertanian. Tidak sampai disini akibat yang akan ditimbulkan karena adanya pembangunan tersebut, melainkan akan terjadi mobilitas sosial yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Tingkat kesejahteraan petani yang ada di daerah tersebut akan merasa terancam karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menyesuaikan dengan lingkungan yang baru.

Lingkungan yang baru mendorong masyarakat untuk lebih bisa adaptasi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Akibatnya tidak hanya harus adaptasi di lingkungan baru tetapi justru muncul tantangan kehidupan yang menuntut masyarakat untuk berjuang lebih keras lagi untuk bisa hidup. Jelas mata pencaharian akan menjadi permasalahan utama setelah berdirinya BIJB dimana masyarakat yang tadinya berprofesi sebagai petani akan beralih dengan profesi lain yang tidak mudah untuk dijalankan karena minimnya kemampuan dan kreatifitas petani untuk menciptakan suatu usaha yang baru, meskipun untuk membangun usaha tersebut ada bantuan dari pemerintah berupa pemberian tunjangan serta pembayaran dari hasil pembebasan lahan yang digunakan untuk BIJB. Disamping itu terjadinya perubahan yang cukup signifikan dari segi sosial ekonomi dan budaya petani.

Pada akhirnya adanya alih fungsi lahan serta beralihnya profesi masyarakat dari petani ke profesi yang lainnya akan berujung pada rendahnya tingkat produktivitas hasil dari pertanian di Kabupaten Majalengka. Jawa Barat yang tadinya sebagai sentral tanaman pangan nasional sebagai pemasok pangan terbesar bagi Indonesia perlahan akan semakin memudar seiring dengan menurunnya jumlah produksi hasil pertanian. Dan Majalengka yang nantinya akan terkena imbas yang paling besar dari adanya pembangunan BIJB bisa jadi bukan lagi kabupaten dengan potensi pangan yang besar, tapi justru menjadi daerah dengan pusat perekonomian tanpa ada pembangunan di sektor pertanian yang menjadi identitas dari Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan penjelasan di atas perlu dilakukan analisis dampak alih fungsi lahan terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Majalengka sehingga dapat diketahui sejauh mana perubahan sosial masyarakat petani serta bagaimana proses adaptasi petani akibat alih fungsi lahan. Dengan adanya analisis ini, diharapkan akan adanya kondisi yang lebih baik bagi petani khususnya dalam kesejahteraan masyarakat petani.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Hasil pangan yang cukup melimpah merupakan salah satu keunggulan dari Kabupaten Majalengka. selain itu, hasil hortikultura yang juga menjadikan Majalengka diberi identitas sebagai penghasil bibit-bibit unggul dan terbaik di Indonesia, berada di daerah yang terletak di daerah yang kaya akan sumberdaya alam dan terhubung dengan pusat ekonomi karena dekat dengan jalur pantura yang termasuk dan tergabung ke wilayah III Cirebon yakni: Kuningan, Indramayu, Majalengka, Cirebon dimana diantara keempatnya saling melengkapi.

Seiring berjalannya waktu Majalengka semakin menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam hal pembangunan sumberdaya ekonomi. Melihat potensi yang ada di Kabupaten Majalengka tersebut mendorong perlunya fasilitas transportasi yang memadai untuk menunjang semua aktivitas ekonomi yang ada di Jawa Barat Maka dibangunlah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) beserta fasilitas penunjang lainnya seperti jalan tol, untuk mempermudah akses dari berbagai daerah.

Adanya pembangunan bandara beserta fasilitas penunjang berakibat pada penyusutan lahan pertanian, perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani serta perubahan mata pencaharian petani. Jauh sebelum adanya perubahan tersebut, pembangunan bandara menyebabkan terjadinya konflik antara pihak pemerintah serta pihak terkait di dalamnya dengan masyarakat yang desanya masuk dalam rencana penggusuran, salah satunya terjadi di Desa Sukamulya dimana mereka menolak pembangunan bandara tersebut karena dirasa merugikan masyarakat. Kini masyarakat Desa Sukamulya semakin bertambah dengan adanya masyarakat dari desa tetangga yang sudah terlebih dulu tergusur. Masyarakat khususnya petani yang berasal dari desa tetangga berharap dapat lebih mudah

beradaptasi setelah pindah, sekalipun Desa Sukamulya masih ada kemungkinan tergusur. Kenyataannya beberapa petani mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya serta mata pencahariannya.

Berdasarkan hal di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi petani dalam mengalih fungsikan lahan?
2. Bagaimana peranan pihak-pihak terkait dalam proses alih fungsi lahan?
3. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan?
4. Bagaimana hubungan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani setelah alih fungsi lahan terhadap perubahan mata pencaharian?
5. Bagaimana hubungan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani, setelah alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan petani setelah alih fungsi lahan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi petani dalam beralih fungsi lahan.
2. Menganalisis peranan pihak-pihak terkait dalam proses alih fungsi lahan.
3. Menganalisis dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan.
4. Menganalisis hubungan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani setelah alih fungsi lahan terhadap perubahan mata pencaharian.
5. Menganalisis hubungan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani setelah alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan petani setelah alih fungsi lahan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta mampu menerapkan ilmu pertanian di masyarakat.
2. Bagi Instansi Pemerintah, sebagai salah satu masukan bagi instansi atau dinas pemerintahan terkait untuk menentukan kebijakan setelah adanya alih fungsi lahan
3. Bagi Masyarakat, sebagai bahan tambahan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif dan adaptif.
4. Bagi Mahasiswa, sebagai bahan literatur bagi mahasiswa dan peneliti lain yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama.

